

SOSIALISASI RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN/ FRAUD CONTROL PLAN



Zulherizal, Ak., Msi., CA., CFA., CRMP., FRMP
Koordinator Pengawasan Investigasi 1
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Bogor, 12 Juni 2024



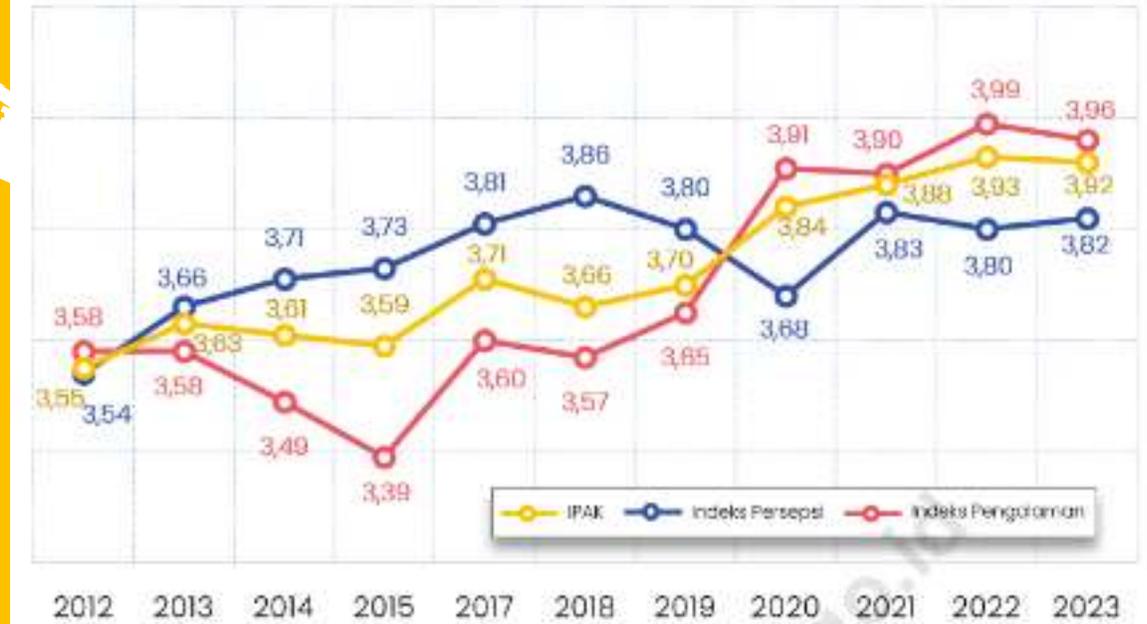
Corruption Perception Index 2023



Pada CPI 2023, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. "CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.

Sumber data : Transparency International

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2023 (BPS)



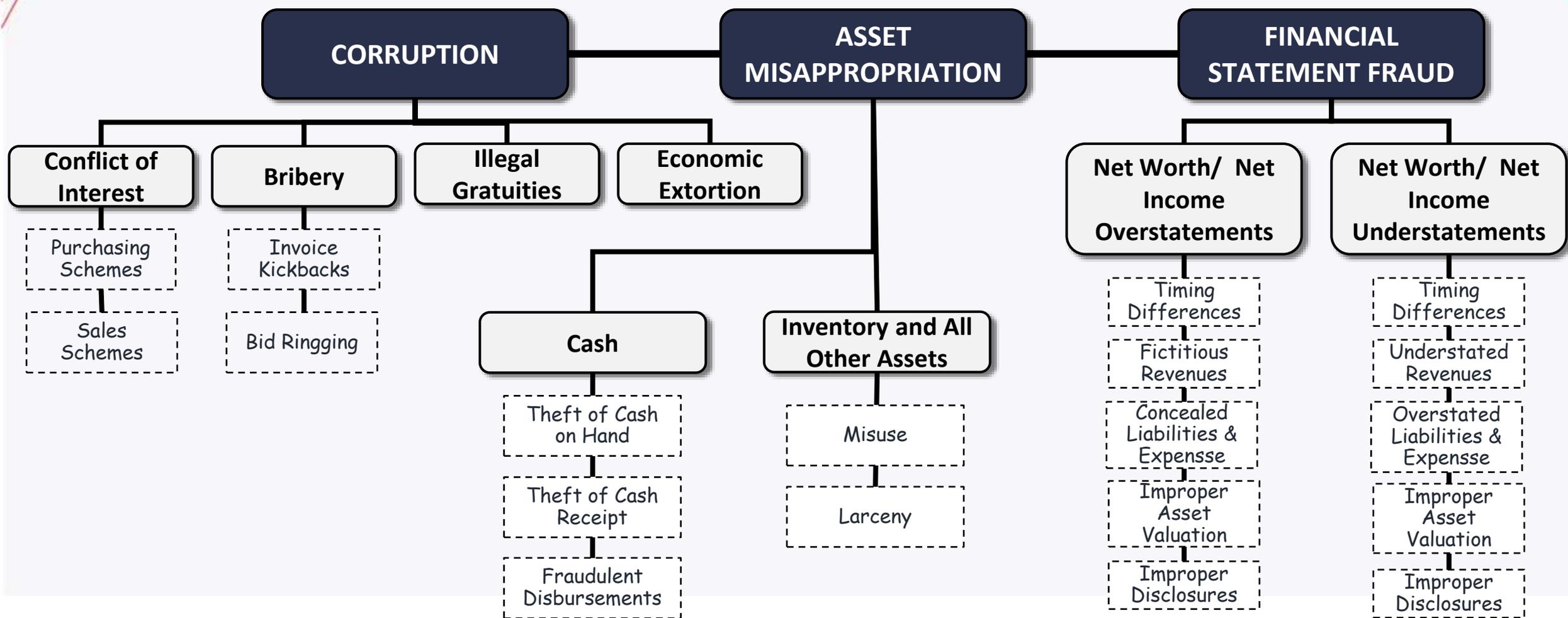


Secara Empiris

**Tidak ada satupun organisasi yang bebas dari risiko kecurangan
(*fraud risk*)**

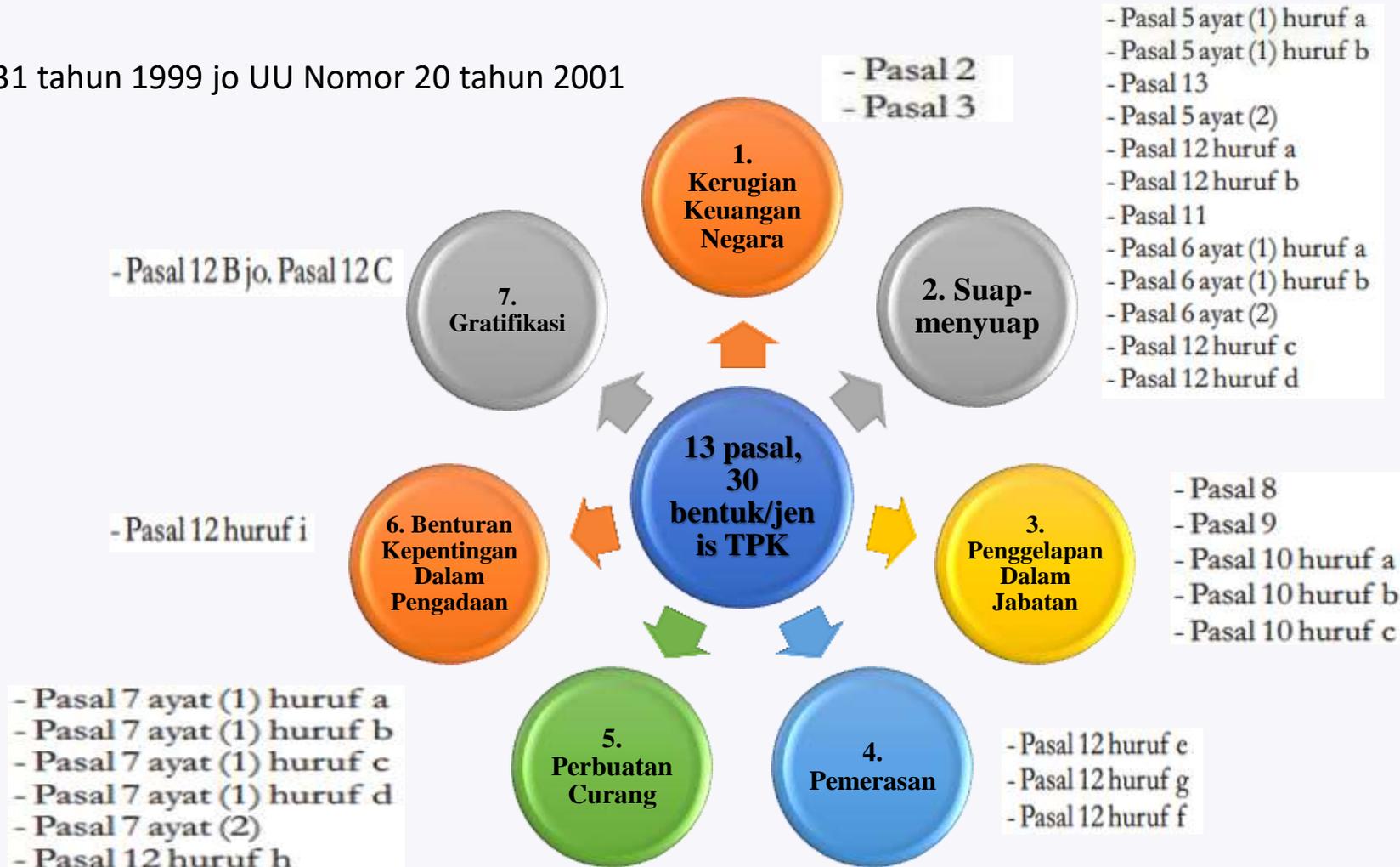
- **Kasasi Ditolak, Total Hukuman Gayus 30 Tahun Penjara**
<http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/Kasasi.Ditolak.Total.Hukuman.Gayus.30.Tahun.Penjara>
- **Rudi Rubiandini: Innalillahi, Saya Terima Vonis 7 Tahun**
<http://news.liputan6.com/read/2043369/rudi-rubiandini-innalillahi-saya-terima-vonis-7-tahun>
- **Angelina Sondakh: Putusan MA Hanya Cari Tepuk Tangan**
<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/1646351/Angelina.Sondakh.Putusan.MA.Hanya.Cari.Tepuk.Tangan>
- **Kasus penggelapan uang, Eks pegawai KPK divonis 4,5 tahun bui**
<http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penggelapan-uang-eks-pegawai-kpk-divonis-4.5-tahun-bui.html>
- **Mantan Penyidik KPK Divonis 8 Tahun Penjara**
<http://www.antaraneews.com/berita/41634/mantan-penyidik-kpk-divonis-8-tahun-penjara>

Klasifikasi Kecurangan (ACFE Fraud Tree)

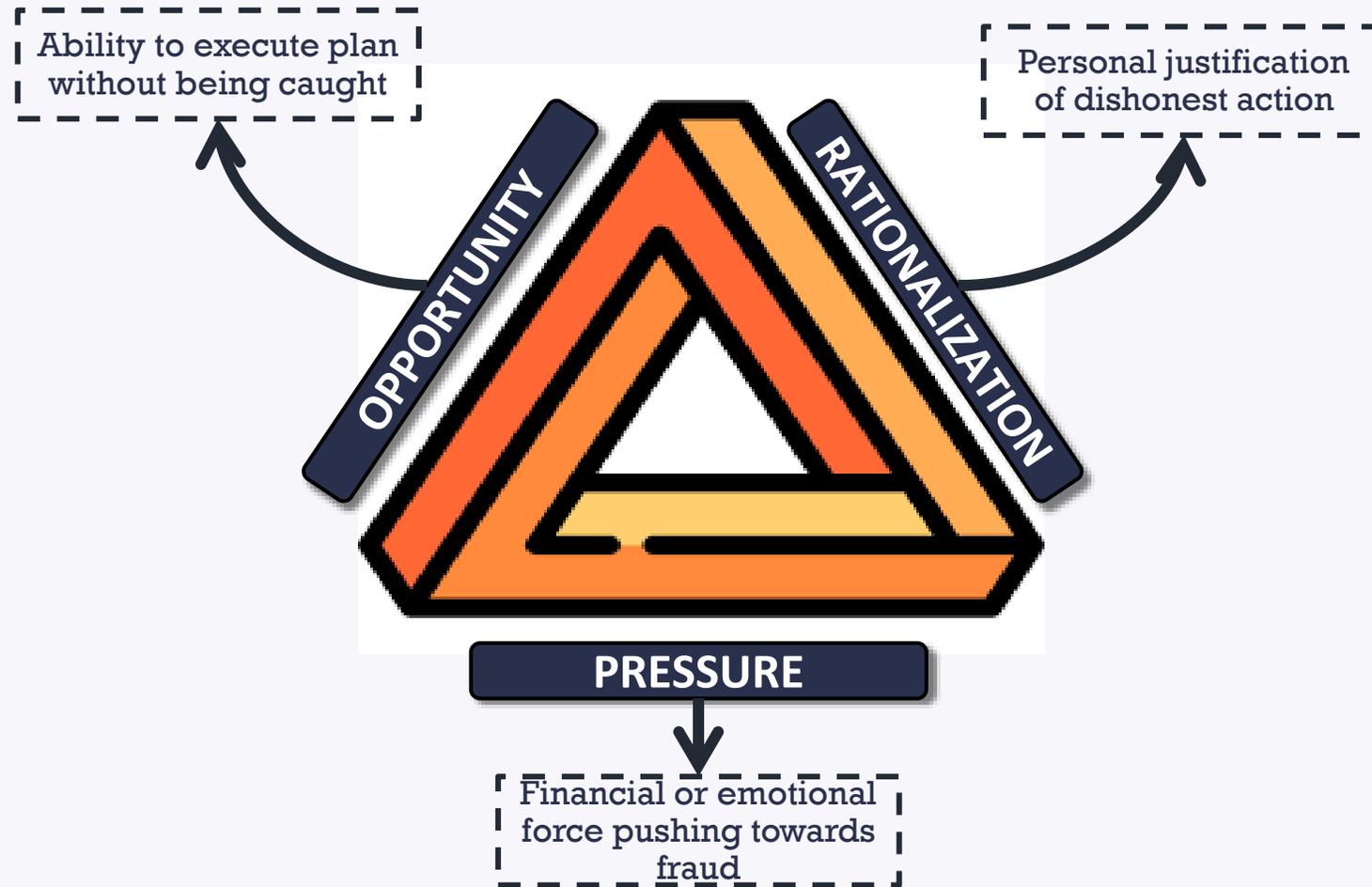


Klasifikasi Kecurangan (UU TIPIKOR)

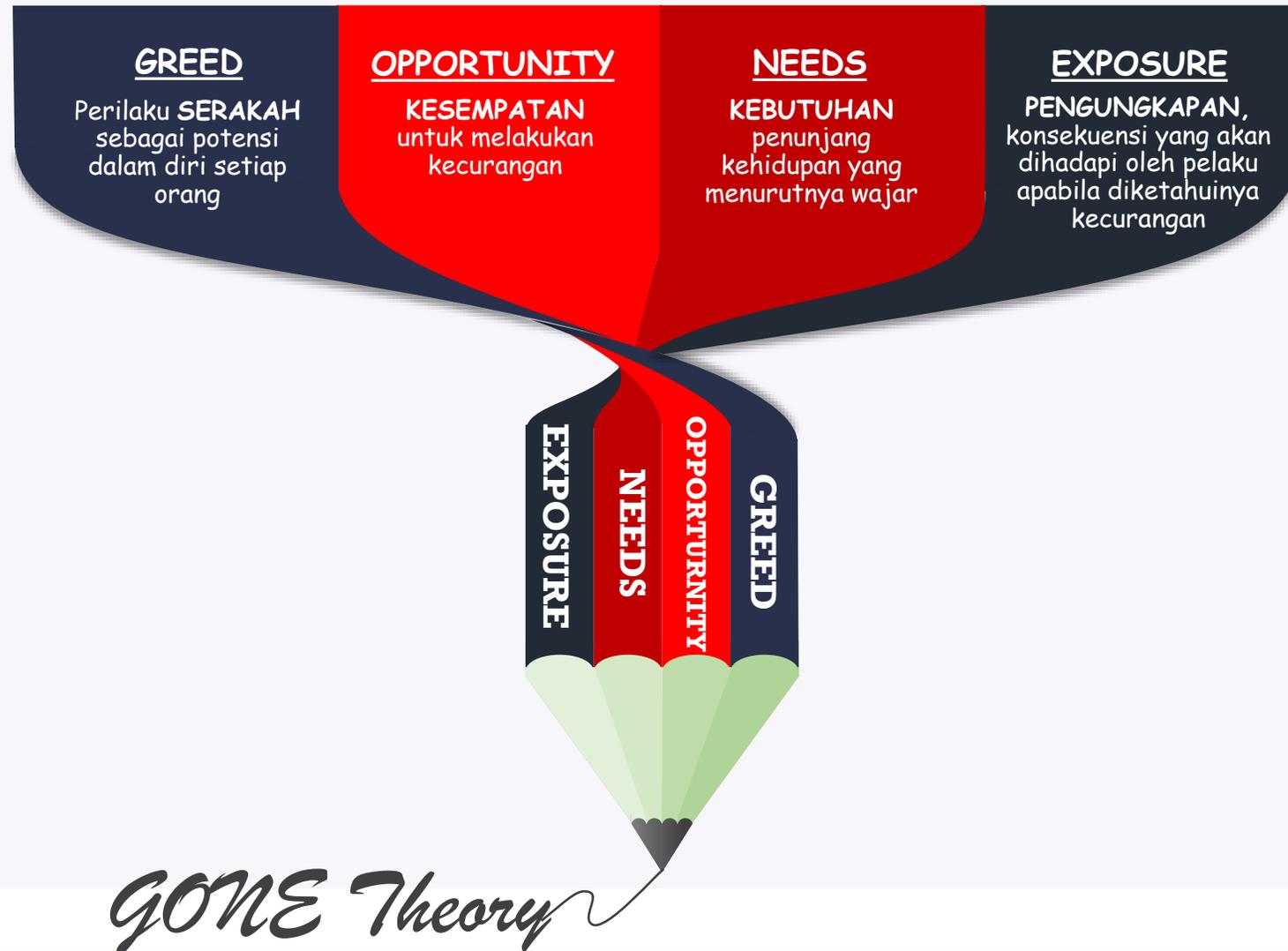
UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001



Penyebab Kecurangan (Fraud Triangle)



Penyebab Kecurangan (GONE Theory)





Dampak Kecurangan bagi Organisasi

- 1. Rusaknya sistem tatanan masyarakat
- 2. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum
- 3. Ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi
- 4. Munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat
- 5. Sikap frustrasi, ketidakpercayaan, dan apatis terhadap pemerintah yang akan berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan

MENGAPA PREVENTIF?

Jika telah terjadi, korupsi mengakibatkan kerugian yang besar

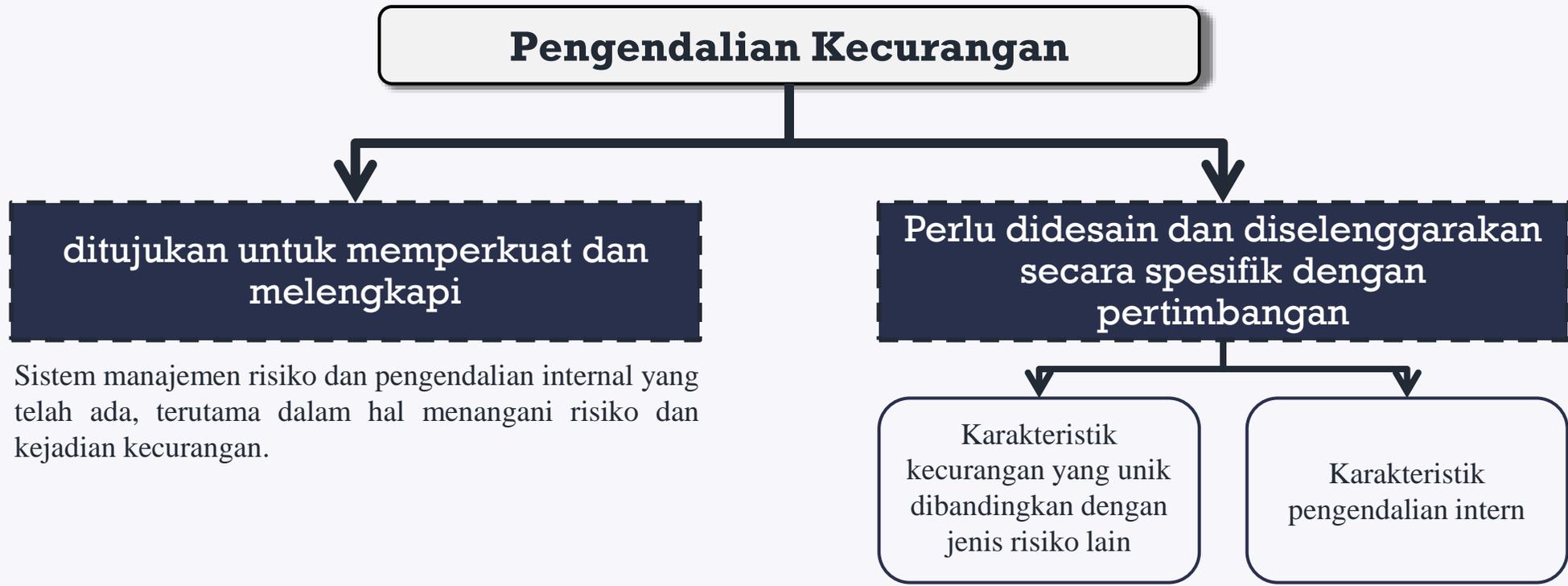
Recovery atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil

Kasus korupsi, merusak reputasi baik institusi maupun individu

Proses litigasi menyita waktu dan biaya, baik bagi aparat hukum maupun calon tersangka

Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain

Pengendalian Kecurangan





Latar Belakang Rencana Pengendalian Kecurangan

Untuk instansi pemerintah, Konsultasi Pengendalian Kecurangan dilakukan dalam rangka mendorong organisasi meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan sasaran utama adalah meningkatnya:

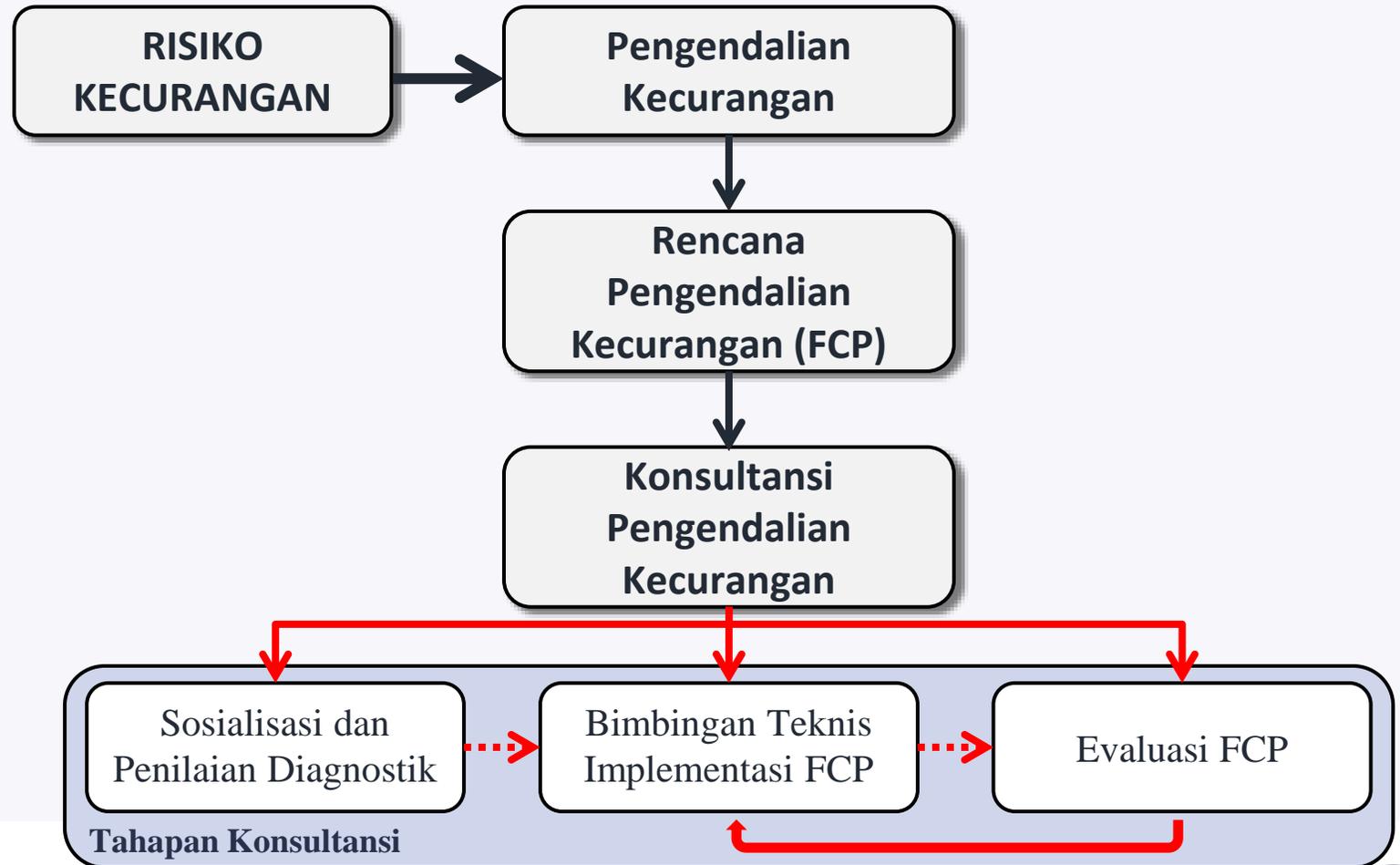
Maturitas penyelenggaraan SPIP dan Indeks Manajemen Risiko

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

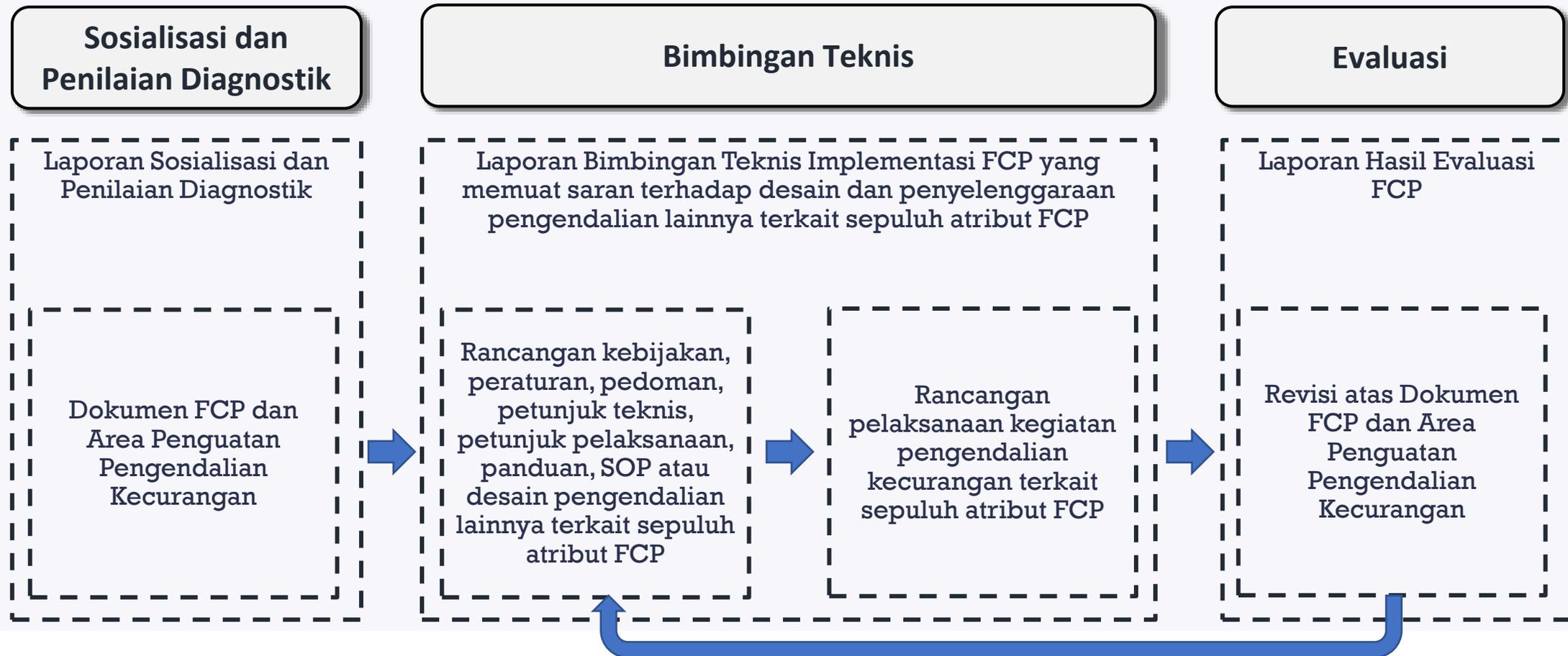
Kapabilitas APIP



Tahapan Konsultansi Pengendalian Kecurangan



Output Konsultansi Pengendalian



Strategi Pengendalian Kecurangan

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN



**Strategi
Pencegahan**

Contoh:
Peringatan
dilarang
merokok



**Strategi
Deteksi**

Contoh: Pasang
Smoke detector



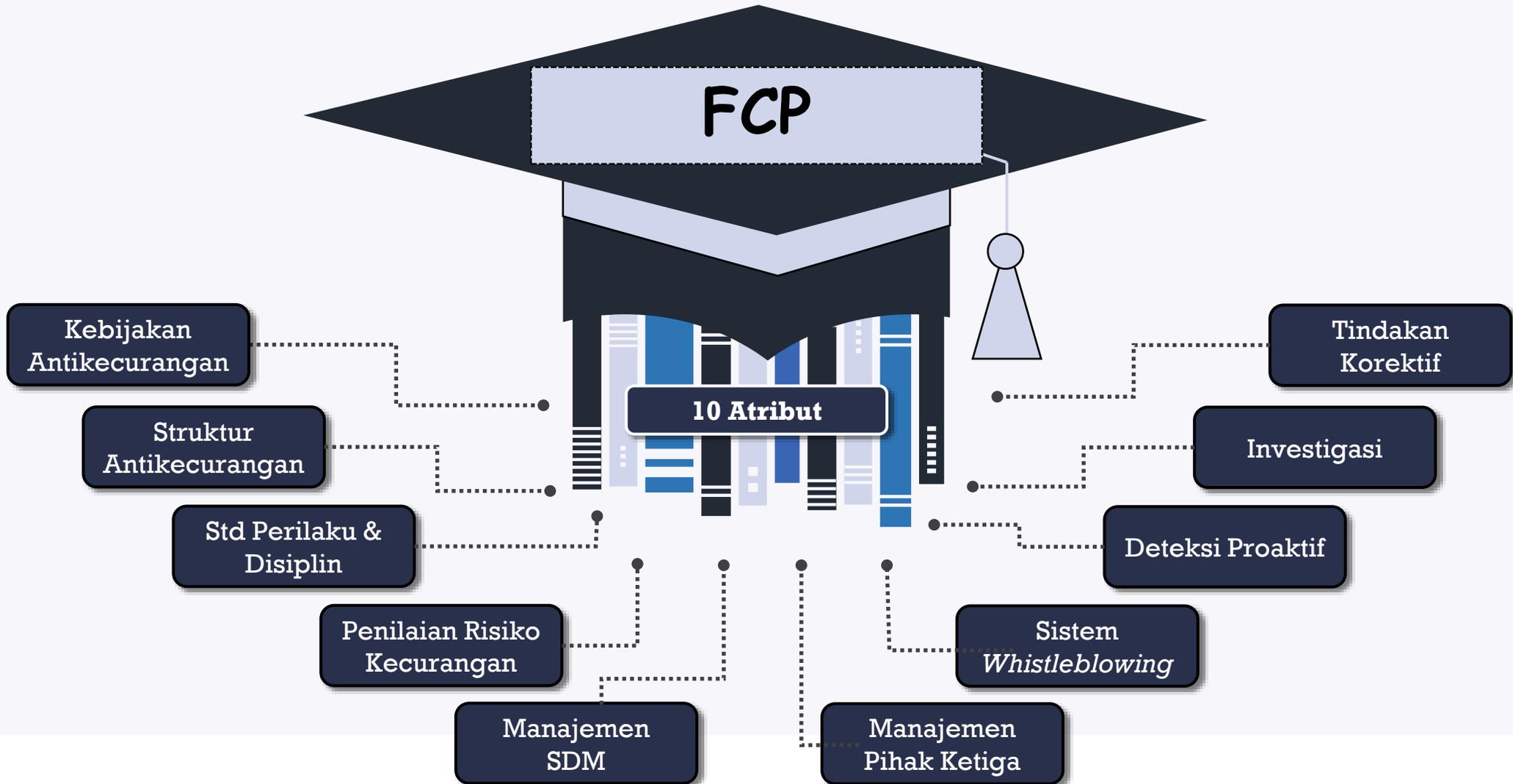
**Strategi
Respon**

Contoh: *Alarm,*
Water spinkler

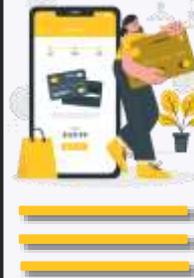
ATRIBUT FCP DAN PILAR STRATEGI FCP

ATRIBUT FCP	PILAR STRATEGI		
	CEGAH	DETEKSI	RESPONS
Kebijakan Antikecurangan	√	√	√
Struktur Antikecurangan	√	√	√
Standar Perilaku dan Disiplin	√		√
Penilaian Risiko Kecurangan	√		√
Manajemen Sumber Daya Manusia	√	√	√
Manajemen Pihak Ketiga	√	√	√
Sistem <i>Whistleblowing</i>	√	√	
Deteksi Proaktif	√	√	
Investigasi			√
Tindakan Korektif			√

Definisi & Atribut FCP



Kebijakan Antikecurangan



merupakan kerangka regulasi implementasi FCP di suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi



Kerangka Implementasi Mengelola Risiko



Pernyataan Komitmen Pimpinan



Terciptanya Budaya Antikecurangan Organisasi



Struktur Antikecurangan

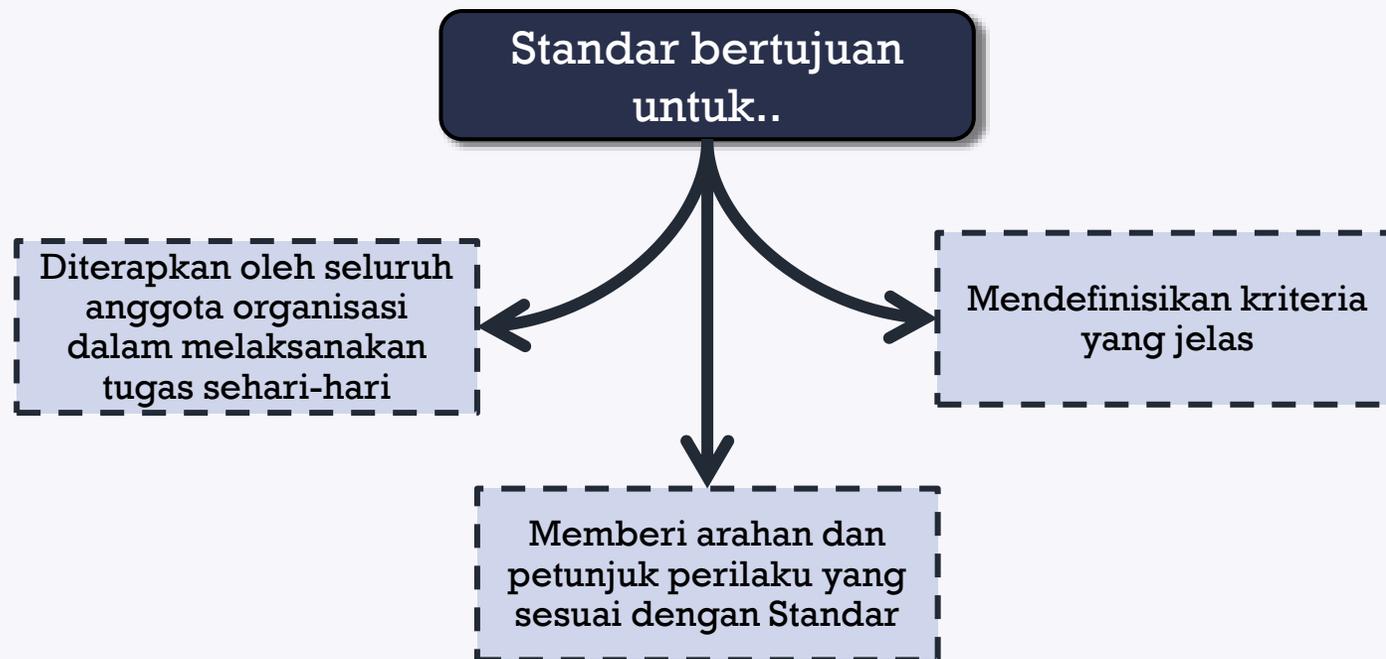
Struktur antikecurangan adalah unit yang mengelola sistem pengendalian penyimpangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksanaan tugas pengendalian. Struktur ini bertujuan untuk..

Meyakinkan *outcome* strategi antikecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan

Menyelaraskan FCP dengan tujuan organisasi



Standar Perilaku dan Disiplin



Penilaian Risiko Kecurangan (FRA)



Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) adalah serangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan

Fungsi FRA

Menghasilkan daftar dan peta risiko kecurangan

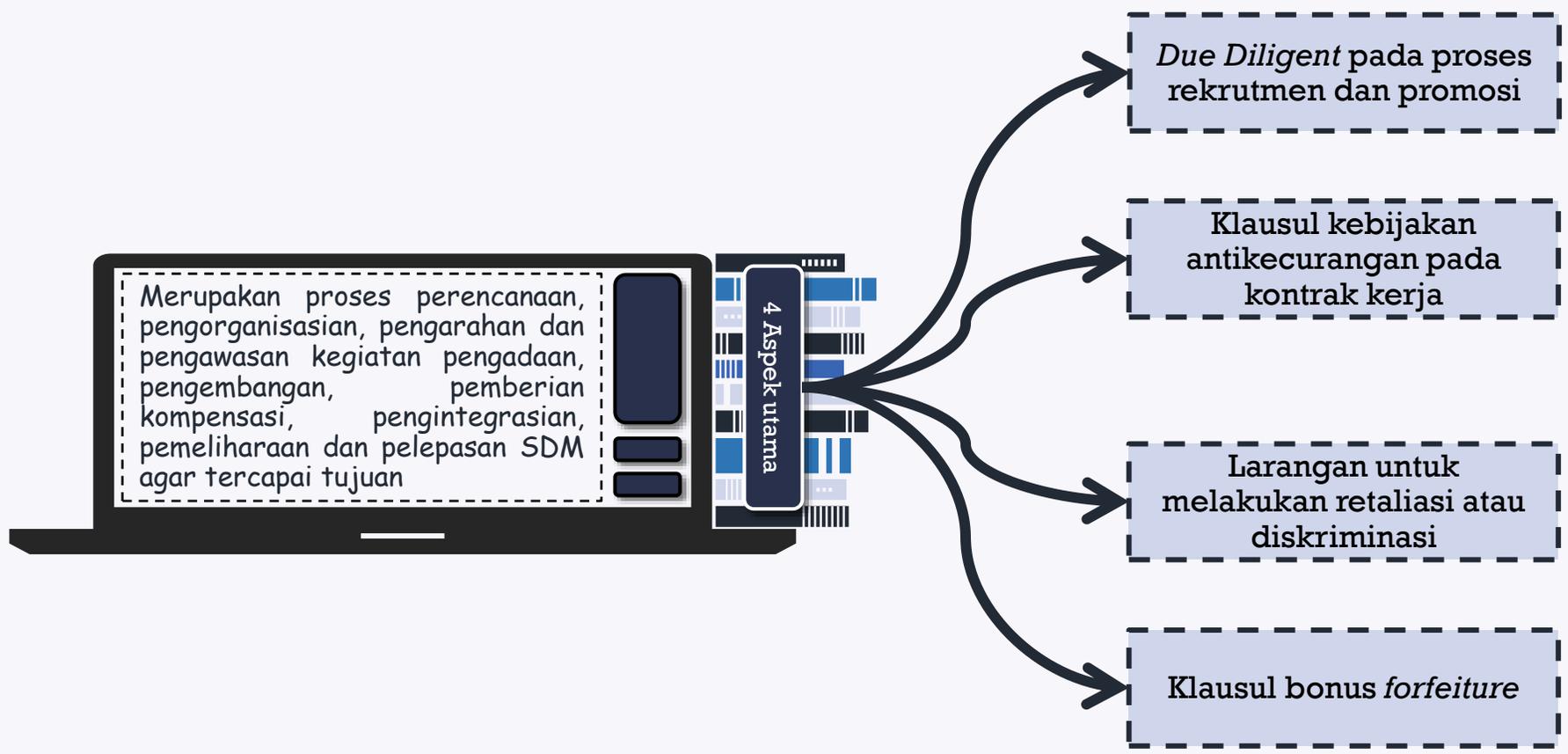
Yang dapat menjadi dasar mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif

Menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan pengendalian kecurangan

Sehingga dapat ditemukan solusi atas kecurangan yang masih terjadi



Manajemen SDM



Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan juga dengan entitas lain, sehingga risiko organisasi dapat muncul bersumber dari..

Pihak
Internal

Pihak
Eksternal

Manajemen pihak ketiga memiliki 4 Aspek Utama:

Due Diligence sesuai
risiko kecurangan

Strategi komunikasi
yang sesuai

Pelatihan yang
diperlukan

Klausul
antikecurangan



Sistem *Whistleblowing* (WBS)





Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif **memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen** organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar.



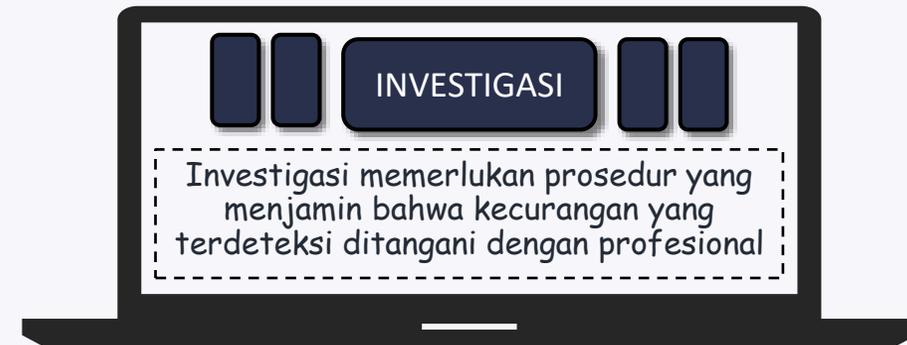
Investigasi

Investigasi merupakan prosedur pengumpulan dan analisis data & informasi untuk membuktikan dugaan kejadian kecurangan. Dalam melaksanakannya, organisasi dapat memilih melakukan...

Investigasi mandiri

Meneruskan ke organisasi lain

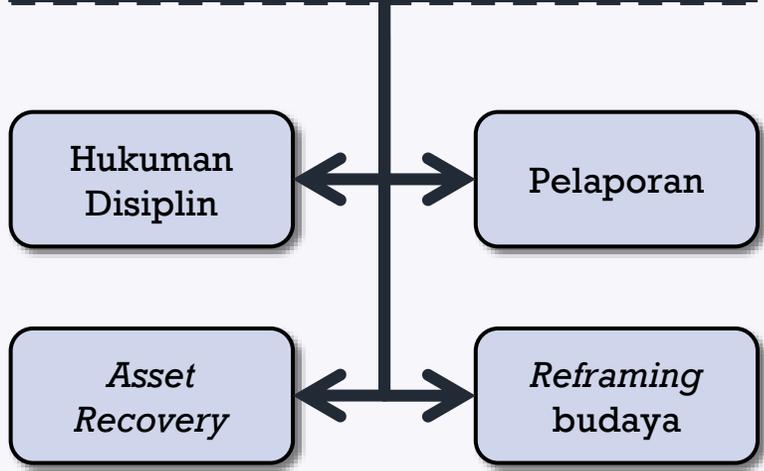
Bekerja sama dengan organisasi lain





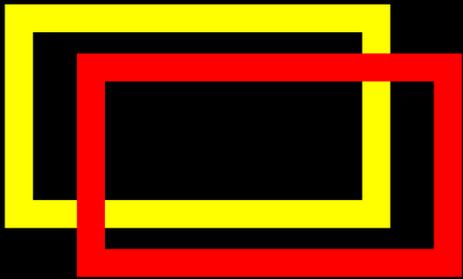
Tindakan Korektif

Merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Untuk melakukannya, organisasi dapat memilih tindakan berikut.



Tujuan dari Tindakan Korektif adalah agar terdapat **Kepastian Hukum** dalam penanganan kecurangan yang terjadi di organisasi tersebut

*iEPK &
Intervensi
Pengawasan*



IEPK utk apa

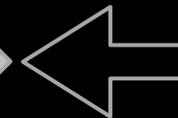
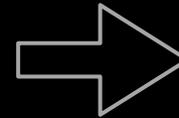
PETA JALAN
untuk perbaikan
GRC korupsi di
KLPBU

**KINERJA
ORGANISASI**



iEPK - Expected

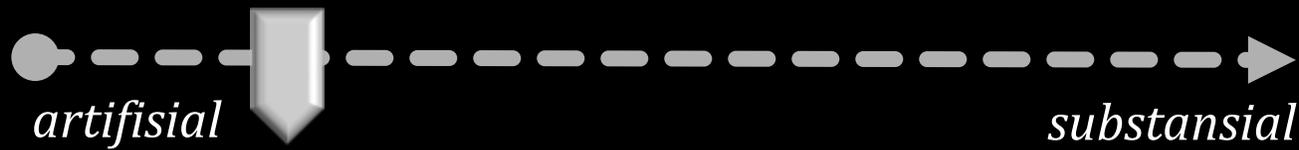
TOOLS
CONSULTING



TOOLS
ASSURANCE

iEPK - Existing

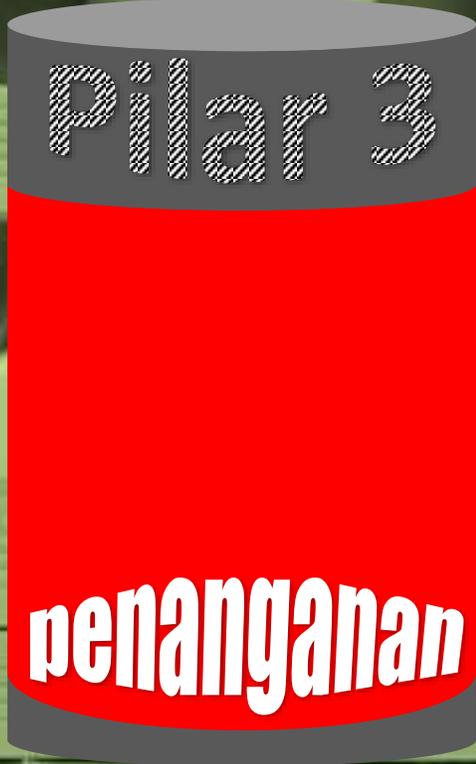
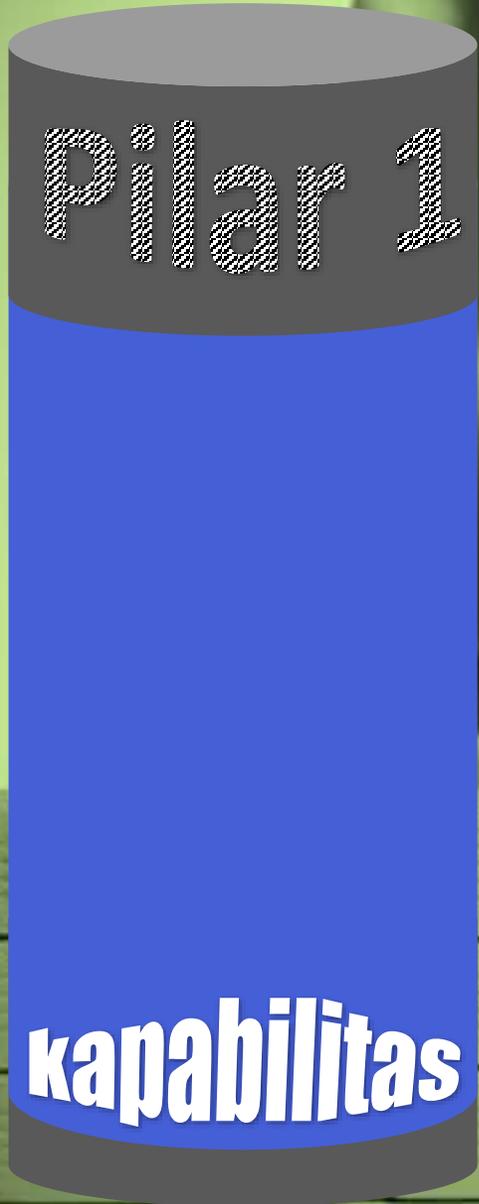
PENDEKATAN PENGUKURAN



EPK dinilai dalam kontinum **artifisial** -> **substansial**

Artinya, kondisi untuk setiap indikator mungkin berada pada **titik terendah**, yakni **risiko korupsi takterkelola, kebijakan/kegiatan antikorupsi artifisial atau formalitas belaka**. Semakin maju, berarti kegiatan semakin substansial hingga sampai ke **titik tertinggi: risiko korupsi terkelola secara substansial (terjadi perubahan nyata di organisasi. Penerapan kebijakan/sistem telah bertransformasi menjadi budaya dan berdampak nyata pada kinerja pencapaian tujuan organisasi)**



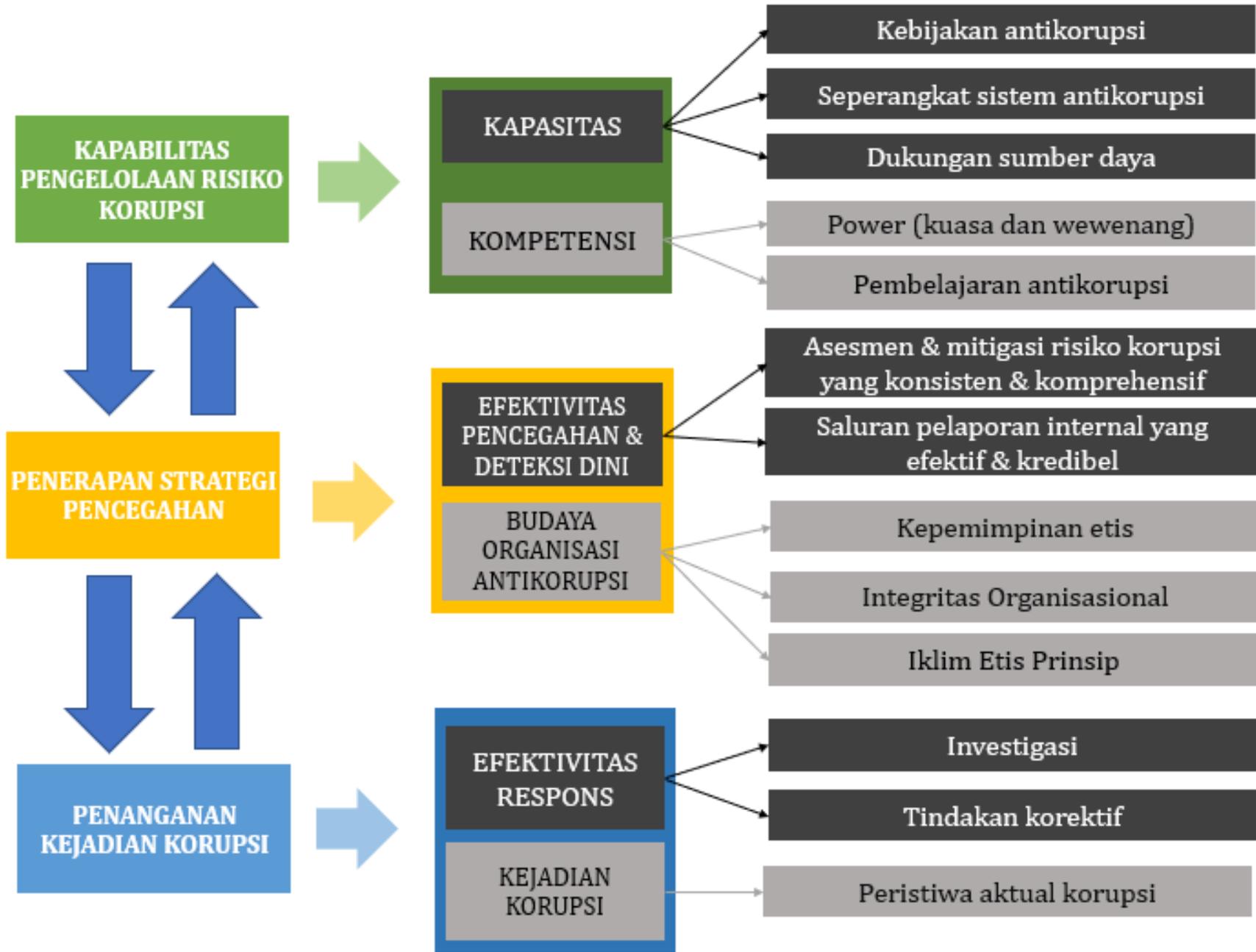


Pilar 1: Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi
Pilar 2: Penerapan Strategi Pencegahan
Pilar 3: Penanganan Kejadian Korupsi

PILAR

DIMENSI

INDIKATOR



PENGUKURAN IEPK DALAM PARAMETER SUBUNSUR SPIP

MAPPING PAREMETER PENGUKURAN IEPK DALAM PENGUKURAN SPIP

PENILAIAN SPIP	AREA/KOMPONEN PENILAIAN IEPK											
	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI					PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN					PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	
	KEBIJAKAN ANTI KORUPSI	SEPERANGKAT SISTEM ANTI KORUPSI	DUKUNGAN SUMBER DAYA	POWER (KUASA DAN WEWENANG)	PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI	ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	KEPEMIMPINAN ETIS	INTEGRITAS ORGANISASIONAL	IKLIM ETIS PRINSIP	INVESTIGASI	TINDAKAN KOREKTIF
2. PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES												
Subunsur 1.1	1 parameter	1 parameter			1 parameter				1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter
Subunsur 1.3			1 parameter	1 parameter				1 parameter				
Subunsur 2.2						1 parameter						
Subunsur 4.1							1 parameter					
Jumlah	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,80
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,50	0,11
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,88	0,14
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	1,88	0,27
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,62
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,82	0,16
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	1,95	0,07
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	1,88	0,17
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,50	0,11
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,50	0,11
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,24
INVESTIGASI	8,00%	1,50	0,12
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,50	0,12
TOTAL	100%		1,66

UNSUR/SUB UNSUR TERKAIT IEPK

Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPIP	-	-
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan			
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset			
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku			
2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK
3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK
4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK
5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK
6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK
7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK
8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK

Kepemimpinan yang Kondusif				
1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-
2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-
3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-
4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-
5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK
6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK
7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK

Analisis Risiko				
1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-
2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-
3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-
4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-
5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-
6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah	SPIP	-	IEPK

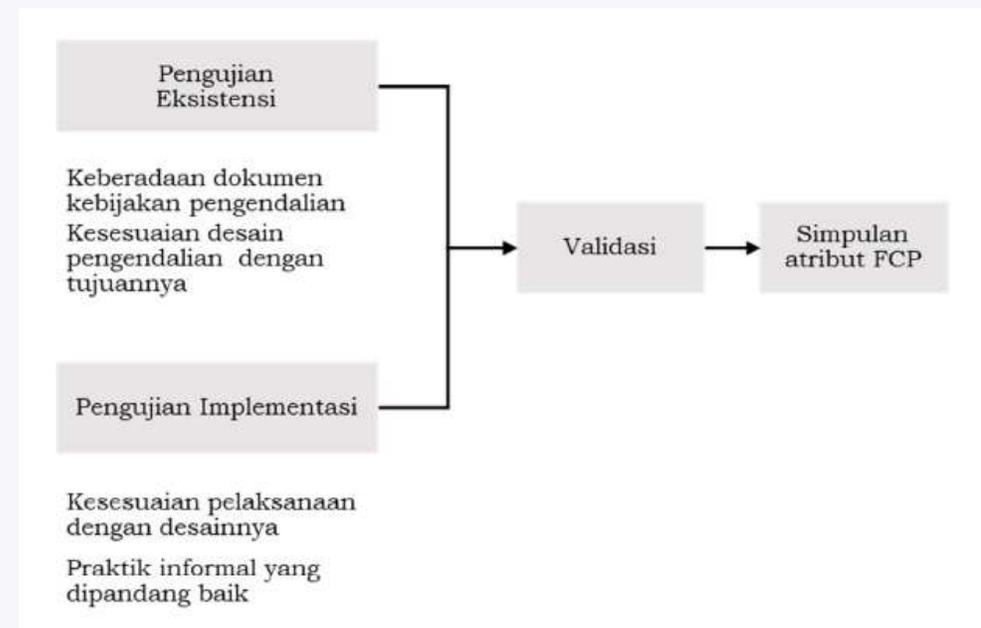
Informasi yang Relevan				
1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-
2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-
3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-
4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-
5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek penggentar yang efektif.	SPIP	-	IEPK



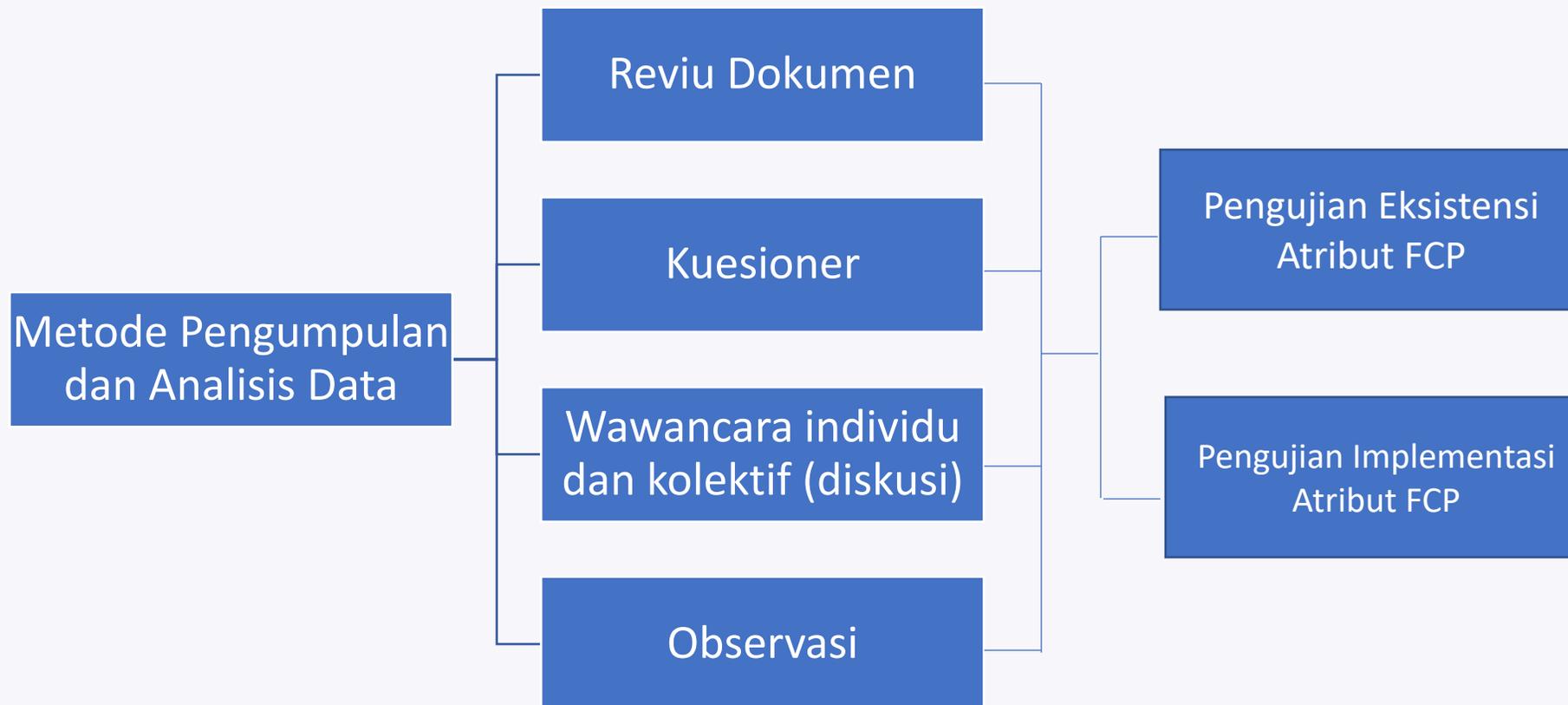
Tahapan Penugasan Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik



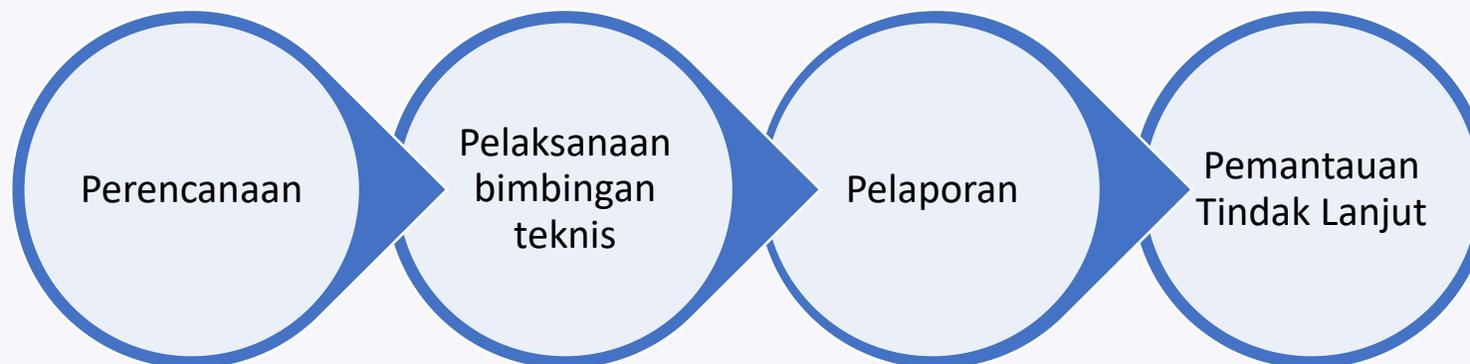
- Pelaksanaan sosialisasi dan penilaian diagnostik;
- 1) Pembicaraan pendahuluan (*entry meeting*);
 - 2) Pelaksanaan Sosialisasi;
 - 3) Pelaksanaan Penilaian Atribut FCP;
 - 4) Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan (FRA);
 - 5) Pembicaraan akhir (*exit meeting*);



Pelaksanaan Penilaian Diagnostik



Tahapan Penugasan Bimbingan Teknis



Tahapan Evaluasi





DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

DEDIKASI | BERANI | INTEGRITAS

TERIMA KASIH

Gedung BPKP Pusat Jalan Pramuka: 33, Jakarta
Telepon (021) 85910031

